
Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Kudsiyeh¹, Zuyyina Linda Sari²

Pascasarjana Universitas Al-Qolam Malang affiliation¹⁻²

Email Korespondensi: kudsiyehpps25@pasca.alqolam.ac.id,

zuyyinalindasaripps25@pasca.alqolam.ac.id

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

Education policy plays a crucial role in guiding the implementation of education to achieve human resource development goals effectively and sustainably. The complexity of educational issues demands systematic analysis so that the resulting policies can address societal needs and current developments. This study aims to examine the concept of education policy analysis models, identify various models used in policy analysis, and explain their implementation in educational practice. The study employed a qualitative approach with library research. Data were obtained from various secondary sources, including books, scientific articles, proceedings, and relevant policy documents. Data analysis was conducted using content analysis techniques to identify the concepts, characteristics, and application of education policy analysis models. The study results indicate that education policy analysis models serve as conceptual frameworks for understanding, explaining, and evaluating the education policy process. Some commonly used models include the institutional model, the process model, the rational-comprehensive model, the incremental model, and the group model. Each model has distinct characteristics, focus, and advantages according to the context of the problem being analyzed. The implementation of these models can be found in various education policies in Indonesia, such as the Independent Curriculum, the PPDB (School Enrollment Program), the KIP Kuliah (School Student Access Program), and teacher certification. Therefore, understanding various policy analysis models is important in supporting the formulation of effective, adaptive education policies that are oriented towards improving the quality of education.

Keywords: Education Policy, Policy Model, Policy Implementation.

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar mampu mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia secara efektif dan berkelanjutan. Kompleksitas permasalahan pendidikan menuntut adanya analisis yang sistematis sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep model analisis kebijakan pendidikan, mengidentifikasi berbagai model yang digunakan dalam analisis kebijakan, serta menjelaskan implementasinya dalam praktik pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, prosiding, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep, karakteristik, dan penerapan model

analisis kebijakan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa model analisis kebijakan pendidikan berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi proses kebijakan pendidikan. Beberapa model yang umum digunakan meliputi model kelembagaan, model proses, model rasional-komprehensif, model inkremental, dan model kelompok. Setiap model memiliki karakteristik, fokus, serta keunggulan yang berbeda sesuai dengan konteks permasalahan yang dianalisis. Implementasi model-model tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti Kurikulum Merdeka, PPDB, KIP Kuliah, dan sertifikasi guru. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai model analisis kebijakan menjadi penting dalam mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Model Kebijakan, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi fondasi utama pembangunan bangsa (Rohmah et al., 2025; Suhartini & Hasibullah, 2025). Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan kebijakan pendidikan yang dirancang secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, maupun teknologi.

Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan tidak muncul secara spontan, melainkan melalui serangkaian proses yang meliputi perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut membutuhkan dasar pertimbangan yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik, pendidik, maupun lembaga pendidikan (Duryat, 2022). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengkaji dan menilai kualitas kebijakan yang diterapkan.

Analisis kebijakan pendidikan menjadi salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk memahami berbagai aspek kebijakan secara komprehensif. Melalui analisis kebijakan, berbagai permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi, alternatif solusi dapat dirumuskan, serta dampak dari suatu kebijakan dapat dievaluasi secara lebih objektif (Taali et al., 2024). Dengan demikian, analisis kebijakan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis bukti.

Untuk mendukung proses analisis tersebut, para ahli mengembangkan berbagai model analisis kebijakan pendidikan. Model-model ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu menyederhanakan kompleksitas permasalahan pendidikan sehingga lebih mudah dipahami dan dikaji (Sari et al., 2026)DDE. Setiap model memiliki karakteristik, asumsi, serta fokus analisis yang berbeda sesuai dengan tujuan dan konteks kebijakan yang ditelaah.

Pemilihan model analisis yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi cara peneliti atau pengambil kebijakan dalam melihat masalah, menentukan alternatif tindakan, dan menilai hasil kebijakan. Beberapa model lebih menekankan aspek rasionalitas dalam pengambilan keputusan, sementara model

lainnya mempertimbangkan faktor politik, sosial, maupun keterbatasan sumber daya yang ada dalam proses kebijakan.

Berdasarkan pentingnya peran analisis dalam menghasilkan kebijakan pendidikan yang berkualitas, pembahasan mengenai model analisis kebijakan pendidikan menjadi relevan untuk dikaji. Pemahaman terhadap berbagai model tersebut dapat membantu akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam memilih pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ini akan membahas konsep dasar model analisis kebijakan pendidikan, berbagai jenis model yang umum digunakan, serta contoh penerapannya dalam konteks pendidikan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya model analisis sebagai instrumen dalam mendukung pengembangan dan evaluasi kebijakan pendidikan yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji berbagai model analisis kebijakan pendidikan (Aziz et al., 2020). Data diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan publikasi guna menjamin kualitas data yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan konsep, jenis, dan implementasi model analisis kebijakan pendidikan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi gagasan utama, menemukan pola keterkaitan antarkonsep, serta menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai model-model analisis kebijakan pendidikan (Ahmad, 2018). Hasil analisis disajikan secara deskriptif sesuai dengan fokus kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Model analisis kebijakan pendidikan merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai proses yang terjadi dalam perumusan hingga implementasi kebijakan pendidikan (Oktavia et al., 2021; Yuliah, 2020). Model tersebut berfungsi sebagai representasi sederhana dari realitas yang kompleks sehingga memudahkan peneliti maupun pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis alternatif solusi, serta memperkirakan dampak yang mungkin timbul dari suatu kebijakan. Dengan adanya model analisis, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan berbasis pada pertimbangan yang rasional.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai produk administratif berupa peraturan atau keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

(Arifin et al., 2024). Kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, pembiayaan pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, hingga pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan memerlukan proses analisis yang komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan pendidikan yang terus berubah.

Analisis kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Melalui proses analisis, berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat diidentifikasi secara lebih mendalam (Yanti et al., 2024). Selain itu, analisis juga membantu dalam mengantisipasi konsekuensi yang mungkin muncul sebelum kebijakan diterapkan sehingga risiko yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Dengan demikian, model analisis kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, tujuan, dan tindakan yang dirumuskan untuk mengatasi suatu permasalahan serta mencapai hasil yang diharapkan. Dalam sektor pendidikan, kebijakan menjadi pedoman bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya (Rozak & Az-Ziyadah, 2021). Keberadaan kebijakan memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan sekaligus menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan program-program pendidikan. Oleh sebab itu, kualitas suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas analisis yang mendasari proses pembentukannya.

Dalam perspektif Islam, proses analisis kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Prinsip perencanaan dapat ditemukan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18 yang menekankan pentingnya orientasi masa depan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, QS. An-Nahl [16]: 125 memberikan landasan mengenai pentingnya pelaksanaan kebijakan dengan pendekatan yang bijaksana, komunikatif, dan mengedepankan hikmah. Adapun QS. At-Taubah [9]: 105 menegaskan pentingnya evaluasi dan akuntabilitas terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan perbaikan berkelanjutan.

Pandangan mengenai analisis kebijakan juga dikemukakan oleh William N. Dunn yang mendefinisikannya sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan publik (Hanisy, 2013). Menurut Dunn, analisis kebijakan mencakup pendekatan deskriptif, evaluatif, dan normatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena kebijakan berdasarkan fakta empiris, pendekatan evaluatif bertujuan menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan, sedangkan pendekatan normatif berfungsi memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan pada masa mendatang (Subianto, 2020). Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa

analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga mengkaji apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Patton dan Sawicki menekankan bahwa analisis kebijakan merupakan proses yang melibatkan identifikasi masalah, penentuan kriteria, penyusunan alternatif, evaluasi pilihan, serta pemantauan implementasi kebijakan. Sementara itu, Dye memandang model kebijakan sebagai alat konseptual yang membantu menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari suatu kebijakan publik. Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa model analisis kebijakan pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjembatani antara permasalahan pendidikan dengan solusi kebijakan yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep model analisis kebijakan menjadi landasan utama dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Model-Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa terdapat berbagai model analisis kebijakan yang dapat digunakan untuk memahami proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Setiap model dikembangkan berdasarkan asumsi dan sudut pandang yang berbeda dalam melihat hubungan antara aktor, institusi, proses, serta tujuan kebijakan. Perbedaan tersebut menyebabkan tidak ada satu model yang dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena kebijakan secara sempurna (Kholifah et al., 2024; Wahab, 2021). Oleh karena itu, pemilihan model analisis perlu disesuaikan dengan karakteristik masalah, tujuan penelitian, dan konteks kebijakan yang sedang dikaji.

Salah satu model yang banyak digunakan adalah model kelembagaan (*institutional model*). Model ini memandang bahwa kebijakan merupakan produk yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga formal yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam bidang pendidikan, lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan memiliki peran penting dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan. Perspektif kelembagaan menekankan bahwa legitimasi suatu kebijakan sangat bergantung pada otoritas institusi yang mengeluarkannya (Nuraini et al., 2016). Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada substansi kebijakan, tetapi juga pada struktur organisasi dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasinya.

Model berikutnya adalah model proses (*process model*) yang memandang kebijakan sebagai rangkaian tahapan yang saling berkaitan. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan lahir melalui beberapa tahap, yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan, legitimasi atau adopsi kebijakan, implementasi, serta evaluasi (Wahab, 2021). Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian pendidikan karena mampu menggambarkan secara sistematis perjalanan suatu kebijakan sejak munculnya masalah hingga penilaian terhadap hasil yang dicapai. Melalui model proses, peneliti dapat mengidentifikasi pada tahap mana suatu kebijakan mengalami

hambatan atau keberhasilan sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat.

Selain itu, terdapat model rasional-komprehensif (*rational-comprehensive model*) yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara rasional berdasarkan analisis yang menyeluruh. Model ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan memiliki informasi yang lengkap mengenai berbagai alternatif tindakan, konsekuensi yang mungkin muncul, serta sumber daya yang tersedia. Dalam model ini, setiap alternatif dibandingkan melalui pertimbangan biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) sehingga dapat dipilih kebijakan yang memberikan hasil paling optimal. Meskipun secara teoritis dianggap ideal, penerapan model rasional sering menghadapi kendala karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas pengambil keputusan.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembang model inkremental (*incremental model*) yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom. Model ini berpendapat bahwa kebijakan pada umumnya tidak dibentuk melalui perubahan yang bersifat radikal, melainkan melalui penyesuaian bertahap terhadap kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dalam praktik pendidikan, pendekatan inkremental sering digunakan karena dianggap lebih realistis dan mudah diterima oleh berbagai pihak yang terlibat. Perubahan yang dilakukan secara bertahap memungkinkan pemerintah mengurangi risiko konflik serta mempermudah proses adaptasi terhadap kebijakan baru.

Model lain yang juga relevan dalam analisis kebijakan pendidikan adalah model kelompok (*group theory model*) (Aziz et al., 2020). Model ini memandang kebijakan sebagai hasil interaksi, negosiasi, dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda. Dalam sektor pendidikan, kelompok tersebut dapat berupa organisasi profesi guru, asosiasi kepala sekolah, organisasi masyarakat, orang tua peserta didik, maupun pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan sering kali merupakan titik keseimbangan dari berbagai kepentingan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, analisis kebijakan melalui perspektif kelompok memberikan pemahaman mengenai bagaimana kekuatan sosial dan politik berperan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap model analisis kebijakan memiliki fokus dan keunggulan yang berbeda. Model kelembagaan menekankan peran institusi, model proses berfokus pada tahapan kebijakan, model rasional mengutamakan efisiensi dan perhitungan logis, model inkremental menyoroti perubahan bertahap, sedangkan model kelompok menekankan dinamika kepentingan para aktor. Keberagaman model tersebut menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan bidang yang multidimensional dan memerlukan pendekatan yang fleksibel. Oleh karena itu, penggunaan satu atau kombinasi beberapa model sering kali diperlukan agar analisis yang dihasilkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu kebijakan pendidikan.

Implementasi Model Analisis Kebijakan dalam Pendidikan

Penerapan model analisis kebijakan pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan di Indonesia. Setiap kebijakan pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat dianalisis menggunakan lebih dari satu model. Melalui penerapan model analisis, proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dapat dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan model analisis juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan suatu kebijakan pendidikan.

Salah satu contoh yang relevan adalah implementasi Kurikulum Merdeka yang dapat dianalisis menggunakan model proses (*process model*). Kebijakan ini diawali dengan munculnya berbagai permasalahan pendidikan, seperti rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik serta kebutuhan akan pembelajaran yang lebih fleksibel. Permasalahan tersebut kemudian masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah dan dilanjutkan dengan penyusunan desain kurikulum, uji coba pada sekolah penggerak, serta implementasi secara bertahap di berbagai satuan pendidikan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka berkembang melalui proses kebijakan yang sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Model inkremental juga dapat dilihat dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya pada pengaturan kuota jalur zonasi. Sejak pertama kali diterapkan, kebijakan ini terus mengalami penyesuaian berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat dan hasil evaluasi pemerintah. Perubahan yang dilakukan tidak bersifat menyeluruh, melainkan berupa modifikasi bertahap terhadap persentase kuota maupun mekanisme seleksi. Pendekatan ini menunjukkan karakteristik model inkremental, yaitu perubahan kebijakan dilakukan secara gradual untuk mengurangi resistensi dan memudahkan proses adaptasi di lapangan.

Contoh lain dapat ditemukan pada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang mencerminkan penggunaan model rasional-komprehensif. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Dalam perumusannya, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah penerima manfaat, kemampuan anggaran negara, serta dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Analisis biaya dan manfaat menjadi dasar penting dalam menentukan efektivitas program sehingga kebijakan yang diambil diharapkan mampu memberikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat maupun negara.

Sementara itu, kebijakan sertifikasi guru dapat dipahami melalui perspektif model kelompok (*group theory model*). Kebijakan ini lahir dari interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pemerintah, organisasi profesi guru, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dan masyarakat. Organisasi guru menginginkan peningkatan kesejahteraan dan pengakuan profesional, sedangkan pemerintah menekankan peningkatan kompetensi serta kualitas pembelajaran. Hasil

dari proses tersebut adalah kebijakan sertifikasi yang tidak hanya memberikan tunjangan profesi, tetapi juga mensyaratkan pemenuhan standar kompetensi tertentu. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara berbagai kepentingan yang berkembang dalam sektor pendidikan.

Di sisi lain, model kelembagaan terlihat dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun pemerintah daerah. Keberadaan lembaga yang memiliki otoritas formal menjadi faktor utama yang menentukan legitimasi dan kekuatan mengikat suatu kebijakan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam mengelola sumber daya, melakukan koordinasi, serta memastikan kepatuhan para pelaksana kebijakan di lapangan.

Berdasarkan berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa model-model analisis kebijakan pendidikan tidak berdiri sendiri dalam praktiknya. Satu kebijakan sering kali mencerminkan karakteristik beberapa model sekaligus karena proses kebijakan melibatkan aspek kelembagaan, rasionalitas, tahapan implementasi, serta interaksi berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang lebih integratif memungkinkan peneliti maupun pengambil kebijakan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dinamika kebijakan pendidikan. Pendekatan semacam ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

SIMPULAN

Model analisis kebijakan pendidikan merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi proses perumusan serta implementasi kebijakan pendidikan. Keberadaan model analisis membantu penyederhanaan berbagai persoalan pendidikan yang kompleks sehingga pengambil kebijakan dapat menentukan alternatif tindakan yang lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam perspektif Islam, proses analisis kebijakan juga sejalan dengan prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kebijaksanaan, serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat berbagai model analisis kebijakan yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan, antara lain model kelembagaan, model proses, model rasional-komprehensif, model inkremental, dan model kelompok. Setiap model memiliki fokus analisis yang berbeda, mulai dari peran institusi, tahapan kebijakan, pertimbangan rasional, perubahan bertahap, hingga interaksi antarkelompok kepentingan. Oleh karena itu, tidak terdapat satu model yang dapat menjelaskan seluruh fenomena kebijakan pendidikan secara menyeluruh, sehingga pemilihan model perlu disesuaikan dengan karakteristik permasalahan dan tujuan analisis. Penerapan berbagai model tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, kebijakan PPDB, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan sertifikasi guru. Temuan

ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan memerlukan pendekatan yang fleksibel dan komprehensif karena suatu kebijakan sering kali mengandung karakteristik lebih dari satu model. Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai model analisis kebijakan menjadi penting sebagai landasan dalam menghasilkan kebijakan pendidikan yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan perkembangan pendidikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Jurnal Analisis Isi*.
- Arifin, N., Yulisma, L., Setiadi, T., Muchtar, H. S., & Koswara, N. (2024). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Dan Kinerja Birokrasi (KPKB). *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(2), 329–346.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyan, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
- Duryat, D. R. H. M. (2022). *Analisis kebijakan pendidikan; Teori dan praktiknya di Indonesia*. Penerbit K-Media.
- Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 4(1), 48–63.
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model perumusan kebijakan pendidikan. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404.
- Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & Jamhari, J. (2016). Model kelembagaan pada agribisnis padi organik kabupaten tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2(1), 9–16.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95–99.
- Rohmah, J., Jannah, W., Aryawati, N. U., & Wahyunintyas, S. P. (2025). Peran Pembangunan Ekonomi dalam Membentuk Sumber Daya Manusia yang Unggul di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 70–87.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim | Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Sari, D. A., Ilianti, R. F. P., Narfais, A. D. M., Yogasara, W., Adywibowo, I. P., Tiningsih, E., Nursalim, M., & Yulianingsih, W. (2026). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kontemporer: Pendekatan Kritis, Desentralisasi, dan Inovasi Kebijakan*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Suhartini, S., & Hasibullah, M. U. (2025). Transformasi Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Nasional di Era Globalisasi. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 4(1).
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwintarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing

Indonesia.

- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 47–52.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.